

2017

Peranan media sosial dalam pengembangan melek politik mahasiswa

Yudha Pradana

Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta / Jakarta Creative Media Polytechnic, Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.uny.ac.id/civics>



Part of the [Other Education Commons](#)

Recommended Citation

Pradana, Y. (2017). Peranan media sosial dalam pengembangan melek politik mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 139-145. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16102>

This Article is brought to you for free and open access by UNY Journal Collections. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* by an authorized editor.

Peranan media sosial dalam pengembangan melek politik mahasiswa

Yudha Pradana

*Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta
yudha.pradana.satu@gmail.com*

Abstract

This research employed quantitative approach and descriptive method. Instrument used by the research is questionnaire of Study Habits and Attitudes to measure the level of usage of media social by students and Likert Scale questionnaire to reveal student's political literacy. Data was analyzed using Rank Spearman Order. The result show that social media used by students 48% good, 26% fair, and 15% poor. Student's political literacy are 36% good, 43% fair, and 21% poor. The role of social media in the development of student's political literacy is 54,79% affected by social media, and 45,21% affected by other factors.

Keywords: *social media, political literacy, political education*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia dewasa ini sangat pesat dan hampir menyeluruh pada aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial politik. Salah satu hal yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut adalah maraknya media sosial (medsos) yang banyak digunakan oleh masyarakat termasuk para mahasiswa sebagai bagian inheren dari kehidupan sosial politik kemasyarakatan di Indonesia. Oleh karenanya, penggunaan dan pemanfaatan media sosial harus dimaksimalkan dan disesuaikan dengan keharusannya sebagai media interaksi dan informasi. Namun, dinamika penggunaan media sosial terkini yang terjadi adalah sebaliknya. Media sosial digunakan tidak maksimal juga seringkali pembiasaan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta, hal inilah salah satunya mempengaruhi bagaimana melek politik mahasiswa sebagai salah satu pengguna media sosial menjadi tidak maksimal sehingga kebutuhan melek politik bagi pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan terhambat.

Media sosial menjadi fenomena yang makin mengglobal dan mengakar. Keberadaannya makin tidak bisa dipisahkan dari cara berkomunikasi antarmanusia. Begitu pesatnya perkembangan media sosial di Indonesia, setiap tahunnya terjadi peningkatan penggunaan media sosial. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2016), statistik pengguna internet Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta, hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8% dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014. APJII juga menyebutkan jenis konten yang diakses sebanyak 97,4% adalah media sosial, dengan penggunaan terbanyak adalah jejaring Facebook sebanyak 71,6 juta (54%), dan Twitter sebanyak 7,2 juta (5,5%). APJII juga melansir bagaimana perilaku pengguna internet yang berhubungan dengan kegiatan berpolitik yakni sebanyak 75,6% setuju media sosial digunakan untuk aktivitas berpolitik.

Berdasarkan gambaran di atas terlihat bagaimana aktivitas media sosial dapat digunakan sebagai sarana berpolitik. Terlebih sejak tahun 2012, penggunaan media sosial khususnya dalam jejaring Facebook dan Twitter sering digunakan untuk kegiatan

politik seperti kampanye atau penyampaian ide. Hal tersebut juga tercermin dalam Pemilihan Presiden 2014 dimana banyak akun-akun yang berafiliasi dengan partai politik atau menjadi sarana penyampaian gagasan politik. Selain itu dewasa ini banyak juga tokoh politik yang memiliki akun media sosial Facebook ataupun Twitter, seperti anggota DPR bahkan Presiden, petinggi partai politik, dan pejabat publik lainnya. Digunakannya media sosial sebagai sarana berpolitik tentu dapat memberikan peranan bagi pengembangan melek politik masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah mahasiswa.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat tentu tidak asing dengan penggunaan media sosial, baik itu sifatnya untuk hiburan, ekonomi, bahkan untuk kepentingan politik. Penggunaan media sosial untuk kepentingan kegiatan politik dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang kegiatan politik yang terjadi, melihat jalannya kegiatan politik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Melek politik menjadi sentral dalam pembangunan kualitas demokrasi suatu bangsa. Melalui pembentukan dan pengembangan melek politik maka warga negara akan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban serta memiliki pengetahuan dan pemahaman akan kedudukannya sebagai anggota resmi dari suatu negara. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap timbulnya kesadaran yang otonom dalam partisipasi pembangunan sistem politik dan demokrasi yang bermutu.

Rumusan masalah yang ditetapkan adalah tingkat penggunaan media sosial oleh mahasiswa, tingkat melek politik mahasiswa, dan peran media sosial dalam pengembangan melek politik mahasiswa. Batasan penelitian

hanya mengkaji bagaimana tingkat penggunaan media sosial oleh mahasiswa dan hanya mengkaji bagaimana tingkat melek politik mahasiswa.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Media Kreatif, yang berlokasi di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Subjek penelitian ini berperan sebagai populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ialah mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif yang berjumlah 3214 orang. Sedangkan pemilihan sampel menggunakan rumus Yamane yang berjumlah 97 orang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Creswell (2009) berpendapat bahwa *the design of a quantitative purpose statement includes the variables in the study and their relationship, the participants, and the research site*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada desain penelitian yang dirancang oleh peneliti, serta kebutuhan akan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang digunakan.

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa kuesioner (angket), dimana angket digunakan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden, dimana responden tinggal memilih jawaban yang menurut mereka paling tepat. Angket yang digunakan dalam penelitian ini dibagi sesuai dengan variabel yang diteliti, yakni penggunaan media sosial dan melek politik mahasiswa. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui penggunaan media sosial digunakanlah skala SSHA (*Survey of Study Habits and Attitudes*) dari Brown dan Holtzman. Pola skala SSHA Brown dan Holtzman ini dengan empat pilihan, yaitu: (1) selalu, (2) sering, (3) jarang; dan (4) tidak

pernah. Sedangkan untuk mengukur melek politik mahasiswa digunakan skala Likert dengan pilihan jawaban a. sangat setuju, b. setuju, c. tidak setuju, d. sangat tidak setuju. Pembobotan skor untuk masing-masing angket adalah 4, 3, 2, 1, sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengolahan angket untuk variabel penggunaan media sosial, dengan skor tertinggi sebesar 111 dan skor terendah sebesar 15, melalui penghitungan panjang interval diketahui sebagai berikut:

$$c = \frac{X_n - X_1}{k}$$

$$c = \frac{111 - 15}{3}$$

$$c = \frac{96}{3}$$

$$= 31$$

Sumber: Data penulis, 2017.

Dengan demikian, maka interval skor untuk menentukan masing-masing kategori penggunaan media sosial oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

- Jumlah skor 15-50: Kurang Baik
- Jumlah skor 51-85: Cukup Baik
- Jumlah skor 86-111 : Baik

Tabel 1 Penggunaan Media Sosial Mahasiswa

Variabel	Kategori	f	%
Penggunaan Media Sosial	Baik	47	48
	Cukup	35	36
	Kurang	15	15
Total		97	100

Sumber: Data penulis, 2017.

Hasil pengolahan angket untuk variabel melek politik mahasiswa, dengan skor tertinggi sebesar 140 dan skor terendah

sebesar 20, melalui penghitungan panjang interval diketahui sebagai berikut:

$$c = \frac{X_n - X_1}{k}$$

$$c = \frac{140 - 20}{3}$$

$$c = \frac{40}{3}$$

$$= 40$$

Sumber: Data penulis, 2017.

Dengan demikian, maka interval skor untuk menentukan masing-masing kategori melek politik mahasiswa adalah sebagai berikut:

- Jumlah skor 20-60: Kurang Baik
- Jumlah skor 61-100 : Cukup Baik
- Jumlah skor 101-140 : Baik

Tabel 2 Melek Politik Mahasiswa

Variabel	Kategori	f	%
Melek Politik	Baik	35	36
	Cukup	42	43
	Kurang	20	21
Total		97	100

Sumber: Data penulis, 2017.

Untuk mengetahui bagaimana peranan media sosial terhadap melek politik mahasiswa, maka digunakan rumus Rank Spearman (Spearman Rank Order Correlation). Dengan menggunakan perhitungan tersebut, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,740. Berdasarkan pedoman interpretasi Guildford, korelasi 0,740 termasuk pada kategori hubungan yang kuat.

Dengan rumus $t = rs\sqrt{\frac{n-2}{1-rs^2}}$ diperoleh nilai t

hitung $t = 0,740\sqrt{\frac{100-2}{1-0,740^2}} = 10,90.$

Dengan db = 98 (n-2) dan $\alpha = 5\%$ untuk pengujian dua pihak, diperoleh nilai t tabel = 1,98. Nilai-nilai perhitungan ini kemudian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Korelasi

Hubungan	Koefisien Korelasi Rank Spearman	Kekuatan hubungan	t hitung	t tabel	Kesimpulan
X-Y	0,740	Kuat	10,90	1,98	Signifikan

Sumber: Data penulis, 2017.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh media sosial terhadap melek politik mahasiswa, dapat diketahui melalui nilai koefisien determinasi.

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = (0,740)^2 \times 100\% = 54,79\%$$

Dari rumus di atas dapat kita ketahui besarnya koefisien determinasi yaitu sebesar 54,79%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 54,79% melek politik mahasiswa dipengaruhi oleh media sosial. Sedangkan sisanya sebesar 45,21% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa penggunaan media sosial oleh mahasiswa termasuk dalam kategori baik. Menurut Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI (2014) media sosial juga memberi dampak besar pada kemajuan politik, reformasi dan iklim yang lebih baik pada demokrasi di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Sejumlah revolusi politik yang diikuti dengan pergantian kekuasaan ke arah yang lebih demokratis banyak ditopang oleh masifnya penggalangan kesadaran melalui medsos.

Oleh karenanya, Fuchs (2011) mengatakan bahwa *the participatory culture model is often opposed to the mass media and broadcasting model typical of newspapers, radio and television, where there is one sender and many recipients. Some scholars argue that culture and society become more democratic*

because users and audiences are enabled to produce culture themselves and to not just listen or watch without actively making and creating culture. Berangkat dari pernyataan tersebut, Fuchs (2011) juga menyimpulkan bahwa *positive aspects of social media and point out that these media are possible to make culture and society more democratic.*

Menurut Fuchs (2011) dengan adanya sarana partisipasi dari publik melalui sosial media, khususnya dalam kehidupan politik, maka dapat dikembangkan dimensi partisipasi sebagai berikut:

1. *The intensification and extension of democracy as grassroots democracy to all realms of society.*
2. *The maximization of human capacities: (human developmental powers) so that humans become well-rounded individuals.*
3. *Extractive power as impediment for participatory democracy: argues that capitalism is based on an exploitation of human powers that limits the development of human capacities. The modern economy "by its very nature compels a continual net transfer of part of the power of some men to others [for the benefit and the enjoyment of the others], thus diminishing rather than maximizing the equal individual freedom to use and develop one's natural capacities".*
4. *Participatory decision-making.*

5. *Participatory economy: a participatory economy requires a “change in the terms of access to capital in the direction of more nearly equal access” and “a change to more nearly equal access to the means of labor”. In a participatory society, extractive power is reduced to zero. A democratic economy involves “the democratizing of industrial authority structures, abolishing the permanent distinction between ‘managers’ and ‘men’.*
6. *Technological productivity as material foundation of participatory democracy.*
7. *Participation as education in participation.*
8. *Pseudo-participation as ideology.*

Berhubungan dengan kegiatan politik dan melek politik warga negara, (Uldam & Vestergaard (2015) menyebutkan bahwa *social media have been praised for their potential for facilitating civic engagement. At a time when one of the most difficult problems facing democracy in the Western hemisphere is the decline in citizens’ participation in politics, this potential has been vested with hopes that social media can help reinvigorate extra-parliamentarian political participation – i.e. participation beyond the rights and obligations of liberal citizenship (e.g. voting) – and thus strengthen democratic accountability at national and international levels.* Tinjauan lain dikemukakan oleh Bakker (2015) menyatakan bahwa *the many studies on social media, and the increasing number of studies considering their application by activists, provide several insights into the options social media offer for activists aiming for institutional change.*

Sedangkan mengenai melek politik, Almond, Verba, & Simamora (1990) mengemukakan dua kriteria untuk mengukur

dimensi melek politik yakni, *pertama* mengikuti segala kegiatan pemerintah. *Kedua* mengikuti laporan mengenai aktivitas pemerintah melalui berbagai media. Kriteria tersebut menggambarkan bagaimana kedudukan dan peran seorang warganegara yang memiliki tingkat melek politik yang akan berpengaruh terhadap jalannya sistem politik suatu negara. Sedangkan Suhiat (2009) mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat *political literacy* warganegara yakni mencakup pengetahuan konstitusi dan sistem politik, pemahaman politik, sikap politik, dan perilaku politik.

Sedangkan Kantaprawira (2004) mengartikan melek politik sebagai perwujudan dari pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Abdurrahman (Suhiat, 2009) berpendapat bahwa semakin tinggi taraf kesadaran seseorang maka akan semakin tinggi pula ketaatannya terhadap sistem politik dan juga sebaliknya. Melek politik berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang politik dan nilai-nilai Konstitusi yang mengatur kehidupan politik. Dari pengetahuan tersebut akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum sehingga akan muncul sikap penghayatan terhadap sistem politik tersebut.

Crick dan Porter (Fyfe, 2007) berpendapat bahwa *A person who has a fair knowledge of what are the issues of contemporary politics, is equipped to have some influence, whether in school, factory, voluntary body or party, and can understand and respect, while not sharing, the values of others, can reasonably be called ‘politically literate’.* Jadi menurut mereka seseorang yang melek politik adalah mereka yang memiliki

pengetahuan tentang isu-isu politik kontemporer dan nilai-nilai lainnya. Crick dan Porter juga mengatakan bahwa seseorang yang melek politik akan memiliki kemampuan untuk menganalisa dimensi politik dari setiap situasi dan hal tersebut dikembangkan melalui pengetahuan, keterampilan dan sikap warga negara muda.

Sedangkan Bev (2008) berpendapat bahwa *political literacy, refers to a set of skills necessary for citizens to participate in society's government. In short, there are abilities what we all need to master, so we can stand tall in front of those government officials who may have prejudices against their constituents and behave not in a respectable manner. It does not mean we aim to be a career politician, but to think and to act as an informed constituent. After all, those government officials cannot become who they are without us.* Dengan kata lain, melek politik merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang warga negara dalam mengisi kegiatan pemerintahan dan sebagai konstituen dari pemerintah.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah didapat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan media sosial oleh mahasiswa 48% termasuk kategori baik, 36% cukup baik, dan 15% kurang baik.
2. Melek politik mahasiswa berada pada kategori 36% baik, 43% cukup baik, dan 21% kurang baik.
3. Peranan media sosial dalam pengembangan melek politik mahasiswa menunjukkan bahwa sebesar 54,79% dipengaruhi oleh media sosial. Sedangkan sisanya sebesar 45,21% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan disampaikan setinggi-tingginya kepada Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Media Kreatif atas fasilitas pelaksanaan kegiatan ini, juga kepada mahasiswa yang bersedia menjadi responden sehingga data penelitian dapat terkumpul dengan maksimal. Tak lupa kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis secara immaterial maupun material.

Daftar pustaka

- Almond, G. A., Verba, S., & Simamora, S. (1990). *Budaya politik: tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2016). *Infografis penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia*. Jakarta.
- Bakker, F. G. A. de. (2015). Online activism, CSR and institutional change. In J. Uldam & A. Vestergaard (Eds.), *Civic engagement and social media: political participation beyond protest* (pp. 23–43). Palgrave Macmillan.
- Bev, J. S. (2008). The urgency of teaching political literacy. Retrieved from <http://www.jenniexue.com/the-urgency-of-teaching-political-literacy/>
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. London: SAGE Publications.
- Fuchs, C. (2011). *Foundations of critical media and information studies*. New York: Taylor & Francis.
- Fyfe, I. (2007). Hidden in the curriculum: Political literacy and education for citizenship in Australia. *Melbourne Journal of Politics*, 32, 110.
- Rusadi, K. (2004). *Sistem politik Indonesia: suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Suhat. (2009). *Pengaruh pembelajaran PKn dalam meningkatkan melek politik*

- warga negara. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tim Humas Kementerian Perdagangan RI. (2014). *Panduan optimalisasi media sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.
- Uldam, J., & Vestergaard, A. (Eds.). (2015). *Civic engagement and social media: Political participation beyond protest*. London: Springer.
<https://doi.org/10.1057/9781137434166>